

Batas Waktu Input TWII-2025 Tanggal 15 Juli 2025

Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja



LAPORAN KINERJAKU

TRIWULAN KE II

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode Triwulan II Tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan Balance Scorecard (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tangerang, 15 Juli 2025

Plt Balai Besar KIPM Jakarta I



Sri Anggoro



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI2

RINGKASAN EKSEKUTIF.....3

BAB I PENDAHULUAN4

1.1 LATAR BELAKANG4

1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....5

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA7

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....11

2.1 VISI DAN MISI11

2.2 CAPAIAN KINERJA.....13

2.3. ANALISIS DAN EVALUASI14

2.3.1. *SK.I. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)..... 15*

2.3.2. *SK.II.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%) 17*

2.3.3. *SK.III.Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%).....20*

2.3.4. *SK.IV. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar JAKARTA I23*

2.3.5. *SK.V. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I.....25*

2.3.6. *SK.VI. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I28*

2.3.7. *SK.VII. Nilai Survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta 32*

2.4 REALISASI ANGGARAN.....36

BAB III PENUTUP.....37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2025 adalah sebesar **109,92**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KIPM Jakarta I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

A. Dari 7 IKK yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, 2 IKK Sudah pencapaiannya memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target JUNI	Capaian JUNI	%	Target s/d JUNI	Capaian s/d JUNI	%
SK.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						113,67			113,67	
IKSK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKSK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	95,51	120	70	95,51	120
IKSK.3	Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta Data Dukung1	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99	99	100	101,01	99	100	101,01
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						111,23			111,23	
IKSK.03.1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	0	0	0	0
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,34	111,12	75	83,34	111,12
IKSK.03.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	100	117,65	85	100	117,65
IKSK.03.5	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	92,32	104,91	88	92,32	104,91

Gambar 1. Gambaran hasil Penilaian IKK

Realisasi Keuangan Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahun 2025 di include dengan anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dikarena Balai Besar KIPM Jakarta I kedepan akan di likuidasi sesuai dengan usulan Badan oleh karena itu Untuk realisasi anggaran khusus Balai Besar KIPM Jakarta I belum dapat di sampaikan dengan rincian realisasi nya .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan penyelenggaraan , Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Keamanan Hayatikan. menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu triwulan pada Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Jakarta



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di Balai Besar KIPM Jakarta I menjadi Jabatan Fungsional sehingga struktur organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I berubah seperti pada Gambar 1.

Pada melaksanakan tugas Balai Besar KIPM Jakarta I sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2024 tentang Mekanisemen Kerja untuk Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya membentuk Tim Kerja pada bidang masing-masing. Pada Balai Besar KIPM Jakarta I Tim kerja menjadi 4 bagian sesuai dengan surat tugas kepala Balai Besar KIPM Jakarta I nomor B: 4272/BBK.JKT.I/KP.440/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024



- 1) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan dan Perikanan
- 2) Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I
- Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Index Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai fungsi antara lain : a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; b) pelaksanaan sertifikasi kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*); c) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan Instalasi; d) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; n) penerapan Sistem Manajemen Mutu pelayanan operasional dan laboratorium; p) pengumpulan, pengolahan data dan informasi ,pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati Ikan; dan q) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Besar KIPM

Jakarta I sejumlah 43 pegawai yang terdiri dari 18 Pegawai berstatus PNS yaitu 1 pegawai pejabat struktural, 3 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Madya, 4 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda, 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, 1 Pranata Komputer Muda, 1 Arsiparis Muda, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama, 3 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, , 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama, 1 Pranata Keuangan APBN Penyelia, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil, 2 Fungsional Umum, 19 orang PPNPN, 6 Tenaga Outsourcing, 2 Tenaga Outsourcing Driver dan Editing. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Balai Besar KIPM Jakarta I juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dalam perspektif *learning and growth*.



SDM BPPMHKP JAKARTA I



4

Badan Mutu KKP Jakarta I



Gambar 3. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025



1.3.SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan IKK sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap IKK disertai rencana tingkat capaian (target) masing- masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki IKK yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan RESNTRA Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan IKK dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam PK Balai Besar KIPM Jakarta I. Penyusunan PK ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Gambar 4. PETA STARATEGIS

PK ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPPMHKP adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP- BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPPMHKP. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Anggoro**
 Jabatan : **Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Anggoro

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Anggoro

Gambar 5. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Balai Besar KIPM Jakarta I ditetapkan dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Aspek yang berkaitan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BPPMHKP Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan



kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan kinerja secara kolektif dari 3 (tiga) bidang di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagaimana **dituangkan dalam RPJMN 2020-2024**, telah ditetapkan total ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan 2025 sangat Baik hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 109,92 %. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.



Gambar 6. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan 2025



2.3 Analisis dan Evaluasi

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99

2.3.1.SK.I. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan.



Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Rumus

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Presentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- F = Persentnase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk



Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)							
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70 %	0	0	70	0	70
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70 %	100 %	120%	70 %	100%	70

1. Capaian IKU

Pada Triwulan II Tahun 2025 BPPMHKP Jakarta I hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- b. Sertifikat Cara Distributor Obat Ikan yang Baik (CDOIB);

Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembudidayaan ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik. Inspeksi CBIB dilakukan di Dua Bersaudara Indonesia tanggal 16 April 2025 usaha pembesaran ikan air tawar di kolam dengan komoditas nila merah Dengan hasil ketidaksesuaian Minor 5 dan Mayor 2 maka kategori Tingkat Pengawasan adalah P1 (pengawasan satu kali dalam lima tahun), Sutardi tanggal 21 April 2025 usaha pembesaran ikan air tawar di kolam dengan komoditas lele

Dengan hasil ketidaksesuaian Minor 7 dan Mayor 5 maka kategori Tingkat Pengawasan adalah P1 (pengawasan satu kali dalam lima tahun), dan Imaging Berkat Bersama Baru Usaha tanggal 14 Mei 2025 pembesaran ikan air tawar di kolam dengan komoditas lele dengan hasil ketidaksesuaian Minor 2 dan Mayor 4 maka kategori Tingkat Pengawasan adalah P1 (pengawasan satu kali dalam lima tahun).

Sertifikat Cara Distributor Obat Ikan yang Baik (CDOIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pembudidayaan ikan yang telah menerapkan Cara Distributor Obat Ikan yang Baik yang telah memenuhi persyaratan dalam mendistribusikan Obat Ikan. Inspeksi CDOIB dilakukan di PT. Satya Samitra Niagatama tanggal 21 Mei 2025



2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$\% X = \frac{A+D}{xn} \times 100\%$$

$$\% X = \frac{3+1}{4} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Tahun triwulan II Tahun 2025 IKU hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tercapai 120 % dari target 70 % terealisasi 100 %.

Karena peralihan wewenang tugas dan fungsi sertifikasi produksi primer dari Otoritas Kompeten sebelumnya ke Badan Mutu Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sehingga terjadi ketidaksinkronan data pelaku usaha yang telah tersertifikasi produksi primer.

Kurangnya Sumberdaya Manusia/ Inspektur yang memiliki kompetensi sertifikasi produksi primer

3. Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten
2. Sosialisasi mekanisme sertifikasi Cara Distributor Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Foto Kegiatan :



Layanan Sertifikasi Produk Perikanan Pasca Panen
 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPM-HKP)

- SKP** Sertifikat Kelembagaan Perikanan
- HACCP** Hazard Analysis and Critical Control Point
- PRDI** Perizinan dan Registrasi Industri Perikanan
- Health Certificate** for Fish and Fishery Products Export

Layanan Sertifikasi Produk Perikanan Primer
 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPM-HKP)

- CPiB Kapal** Cara Penganganan Ikan yang Baik diatas Kapal Perikanan
- CBiB** Cara Budidaya Ikan yang Baik
- CPOiB** Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
- CPiB** Cara Pembibitan Ikan yang Baik
- CDOiB** Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik
- CPPiB** Cara Pembuatan Bekas Ikan yang Baik



2.3.2 SK.II.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Di sampaikan dengan rumus sesuai dengan manual IKU



$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Indikator Presentase Hasil kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
<i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)</i>							
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70 %	0	0	70	0	70
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70 %	94.51%	135.01%	70%	70%	70%

1. Capaian IKU

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia, dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu : Pertama, fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 Sertifikasi HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian ini berasal dari 15 UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan. Berdasarkan peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan UPI juga telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Capaian indikator diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase capaian penerbitan sertifikat dari seluruh UPI Per triwulan

Tahun triwulan II Tahun 2025 IKU persentase HACCP yang terbit pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah Besar tercapai 135.01 % dari target 65 sertifikat terealisasi 71 sertifikat.

Realisasi terhadap IKU persentase SKP yang terbit pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah Besar triwulan II tahun 2025 tercapai 79.78 % dengan jumlah sertifikat terbit sebanyak 150 dari 188 rekomendasi.

$$\% A = \frac{71}{65} \times 100\% = 109.23 \%$$

$$\% B = \frac{150}{188} \times 100\% = 79.78 \%$$

$$\% X = \frac{109.23 + 79.78}{2} \times 100\% = 94.51 \%$$

Kurangnya Sumberdaya Manusia kompeten yang dapat menjalankan tugas-tugas terkait jaminan mutu dan pengendalian mutu/ Inspektur Mutu yang memiliki Nomor Registrasi.

3. Rekomendasi Rencana Aksi

Inspektur Mutu mengikuti pelatihan lanjutan untuk mendapatkan Nomor Register.

Foto Kegiatan :

2.3.3. SK.III. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan



Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

RASIO ESKPOR IKAN HASIL PERIKANAN YANG DI TERIMA OLEH NEGARA TUJUAN ESKPOR LINGKUP BALAI BESAR KIPM
JAKARTA I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP	
TW I	Tagret 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	0	0	99	0	99	99
TW II	Tagret 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	100%	101,01	99	100%	99	99

1. Capaian IKU

- BPPMHKP meningkatkan pengawasan dan pengendalian sistem jaminan mutu kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)/ Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan kesehatan ikan pada setiap tahapan proses produksinya, peningkatan kepatuhan internal maupun eksternal, peningkatan kapasitas laboratorium (SDM, peralatan dan bahan, metode, dan akreditasi), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Capaian indikator diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase capaian penerbitan sertifikat dari seluruh UPI Per triwulan
- Realisasi terhadap IKU persentase keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor (Negara) sebesar 100%

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Jumlah negara tujuan ekspor yang memiliki dokumen kesetaraan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan hasil Perikanan dengan antara lain MOu/ MRA/ dokumen penyetaraan sistem jaminan mutu Dalam pelaksanaan keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor (Negara) triwulan II pada bulan April jumlah SMKHP terbit sebanyak 807



sertifikat (SMKHP A= 7, SMKHP B= 215, SMKHP D= 10, SMKHP E= 17, SMKHP F= 47, SMKHP G= 236, SMKHP H= 290 dan Traces = 15), bulan Mei jumlah SMKHP terbit sebanyak 1.428 sertifikat (SMKHP A= 9, SMKHP B= 716, SMKHP D= 15, SMKHP E= 29, SMKHP F= 69, SMKHP G= 298, SMKHP H= 346 dan Traces = 10), bulan Juni jumlah SMKHP terbit sebanyak 968 sertifikat (SMKHP A= 7, SMKHP B= 324, SMKHP D= 26, SMKHP E= 16, SMKHP F= 37, SMKHP G= 283, SMKHP H= 266 dan Traces = 9).

Administrasi Umum Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok (GACC) mempertanyakan format HC Indonesia ke Tiongkok. yang baru akan berlaku efektif sejak 1 Juli 2025 yang ditandai dengan tanggal Penandatanganan HC, sedangkan di system sudah diberlakukan per 1 Juni 2025.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menerbitkan ulang HC produk perikanan yang telah terbit per 1 Juni 2025 secara manual

Foto Kegiatan





Sasaran Kegiatan II

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 9 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Presentnase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (100)

Index Profesional ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (87)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (85)

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (88)

2.3.4. SK.IV.Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar JAKARTA I

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil tahun 2024}} \times 100\%$$



Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP							
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	0	0	0	0	87	100

1. Capaian IKU
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi
3. Rekomendasi Rencana Aksi

Foto Kegiatan

2.3.5. Indek Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks

Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (Empat) dimensi, meliputi :
 - a. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
 - b. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
 - d. perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
 - e. Dimensi Disiplin (5%) - mengukur data / informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma Tiga)/ SM (Sarjana Muda)



e. Pendidikan D-2 (Diploma Dua) / D-1 (Diploma Satu)/ SLTA/ Sederajat

Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SLTA	5
0	SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ sejenisnya.
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP);
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Laporan Kinerja _– Tahun 2024
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan level
 - Jabatan terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu Tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

IKK ini dihitung dari jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing- masing jawaban indikator.



Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025						Renstra BPPMHKP 2020-2024
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	86	0	0	0	87	0	88	88
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
82,58	85	88	92,32	104,91	88	104,91	88	88

1. Capaian IKU

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks. Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian pada Triwulan ke dua (II) dengan target 75 BPPMHKP Jakarta I dalam nilai capaian sudah melewati dari target yang di tetapkan rata rata pegawai mendapatkan nilai tinggi dengan nilai di atas 80 walaupun ada beberapa pegawai yang masih rendah

Nilai capaian BPPMHKP Jakarta I dapat di lihat table berikut ini :



IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
No	Unit Kerja	Dihitung	A1		A2		A3		A4		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	67	22,91	91,64%	26,37	65,92%	25	83,33%	5	100%	78,28	SEDANG
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	26	23,08	92,32%	28,96	72,4%	25	83,33%	5	100%	82,04	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	25	23,2	92,8%	27,68	69,2%	25,2	84%	5	100%	81,08	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	28	21,79	87,16%	27,98	69,95%	25	83,33%	5	100%	78,77	SEDANG
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	23,12	92,48%	30,22	75,55%	25	83,33%	5	100%	83,34	TINGGI

Daftara masing masing IP ASN Pegawai

IP ASN 2025															
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024															
	Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP			
1	DONIE SAKTYA DHARMA	S-1	20	20	-	10	-	1	31	BAIK	25	0	5	81	TINGGI
2	INGGARDWI WAHYUNI	S-1	25	20	0	-	-	2,25	22,25	BAIK	25	0	5	72,25	SEDANG
3	EKA SUSTIYANINGSIH	D-III	25	20	-	-	10	0,75	30,75	BAIK	25	0	5	85,75	TINGGI
4	DICKY AFRIYANTO	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	0	20	BAIK	25	0	5	70	RENDAH
5	DWI WARDANI	S-1	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
6	MUJI DWI SAPTONO	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
7	NOVI SUSIANTI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
8	NOVIANA DEWI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
9	MOCH FAREZ DWI SENTANU	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
10	PRAMUDYANANTO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
11	SUSIANA	S-1	20	20	-	10	-	2,25	32,25	BAIK	25	0	5	82,25	TINGGI
12	YUNARI SIGIT PRAMONO	S-1	25	20	-	10	-	2,25	32,25	BAIK	25	0	5	87,25	TINGGI
13	KISMONO KUDOASMORO	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
14	GALIH PRATOMO SUWIATNO	D-III	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
15	ARI NURYATMAN	D-III	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI

Ada beberapa pegawai yang nilai nya masih di bawah rata rata ini di sebabkan kurang mengikuti kompetensi .Khusus Struktrual yang menjadi kendala dalam capaian IP ASN adalah harus mengikuti DiklatPim 4 yang di laksanakan oleh lembaga pelatihan internal dan jadwal kegiatan langsung lembaga internal sendiri

3. Rekomendasi Rencana Aksi

Setiap pegawai untuk meningkatkan IP ASN harus lebih banyak mengikuti elearning dan zoom meeting yang sesuai dengan jabatannya masing masing

Foto Kegiatan



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
Nomor : B.268/6DA/RSDM.510/II/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama	: Dwi Wardani
NIP	: 198201042014032001
Tempat Lahir	: Cilacap
Tanggal Lahir	: 4 Januari 1982
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / I/IIa
Jabatan	: Pelaksana
Instansi	: Balai Besar KIPM Jakarta I

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :
Dasar - Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan
oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 15 (lima belas) jam pelajaran (JP).



16 Februari 2025
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan
Lilly Aprilia Pregiwati



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
Nomor : B.268/6DA/RSDM.510/II/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama	: Dwi Wardani
NIP	: 198201042014032001
Tempat Lahir	: Cilacap
Tanggal Lahir	: 4 Januari 1982
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / I/IIa
Jabatan	: Pelaksana
Instansi	: Balai Besar KIPM Jakarta I

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :
Dasar - Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan
oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 15 (lima belas) jam pelajaran (JP).



16 Februari 2025
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan
Lilly Aprilia Pregiwati



2.3.6.SK.VI. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Presentnase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.

Formula penghitungan IKK ini sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

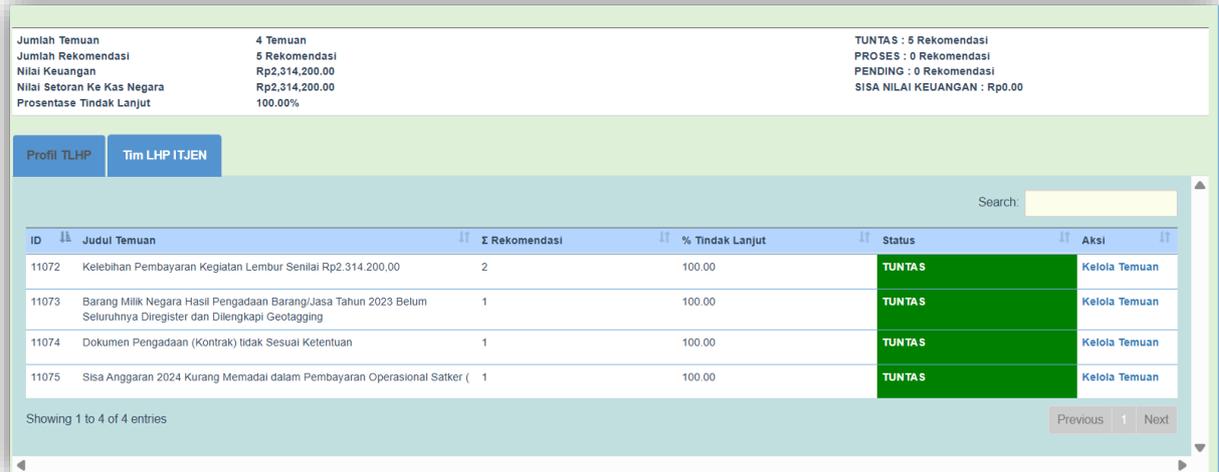
$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai Besar KIPM Jakarta I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I

$$\frac{\sum 4 t}{\sum 5} \times 100\%$$

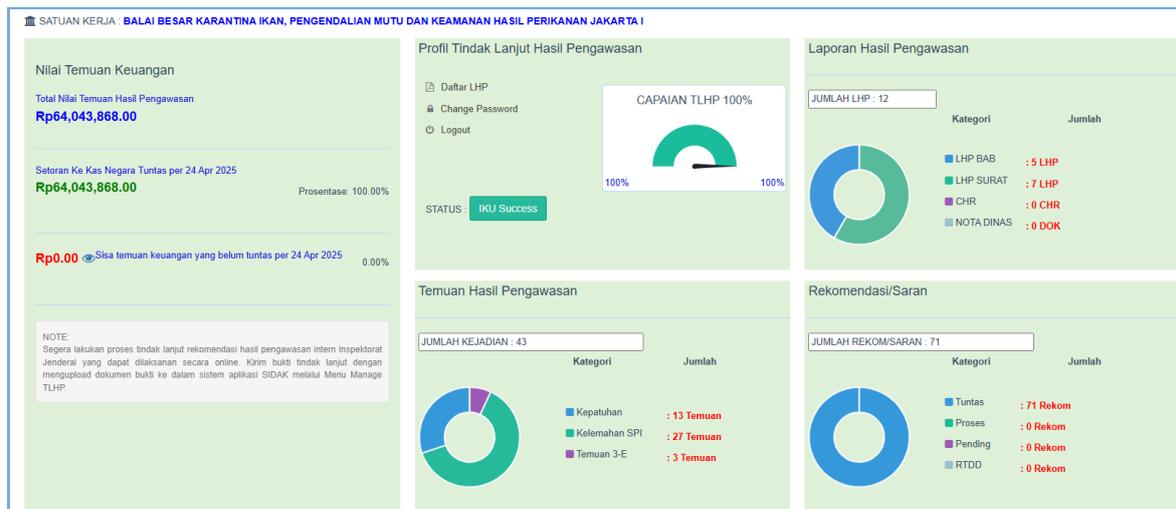
$\sum Nt = 4$ Temuan Irjen

$\sum N = 5$ Rekomendasi



Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Dari 4 Temuan dan 6 Rekomendasi Irjen sesuai dengan Aplikasi sidak semua nya sudah di tindak lanjut semua sesuai dengan hasil pada aplikasi Sidak



Gambar 8. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

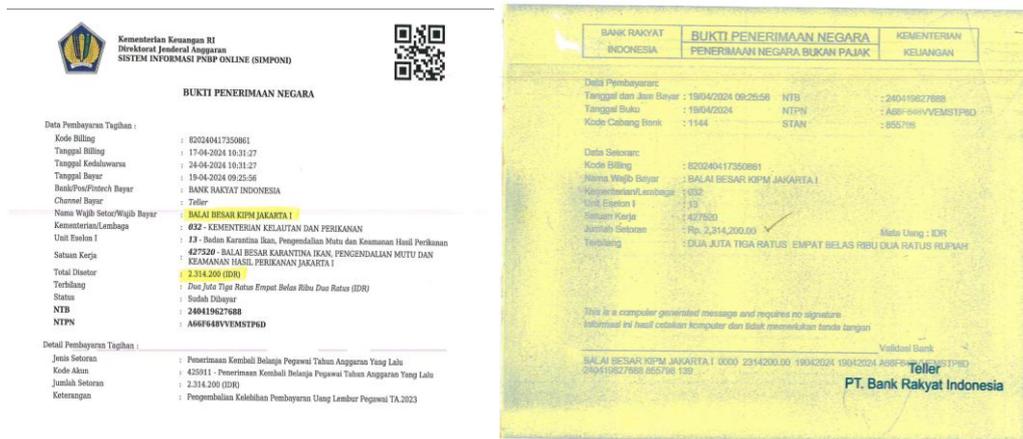
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Revisi Renstra BPPMHKP 2020-2024
TW I	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100
TW II	2014	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100

1. Capaian IKU

Capaian Pada Presentase Rekomendasi Pegawai yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dari 4 Temuan dan 5 rekomendasi seluruhnya telah di tindaklanjuti, 1 temuan TGR berupa kelebihan pembayaran uang lembur senilai Rp2.314.200 dan sudah di tindak lanjut dengan menyetorkan dengan nomor NTPN A66F48VVE MSTP6D dan bukti setor dengan nomor NTB : 240419627688



Gambar 8 Bukti setor

Untuk 3 temuan lain berupa teguran dan rekomendasi yang semua sudah di tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dari masing masing temuan

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasil Balai Besar KIPM Jakarta menuntaskan temuan dengan koordinasi antar pegawai khususnya bagian keuangan yang menjadi leader dalam menuntaskan temuan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan temuan



3. Rekomendasi Rencana Aksi

Dalam Rencana aksi untuk mengantisipasi temuan yang berulang maka setiap ketua tim kerja untuk membuat rencana kerja yang nanti akan di sampaikan kebagian umum sebagai bahan pengawasan khususnya yang ada hubungan dengan keuangan setiap hasil kegiatan untuk pertanggung jawaban harus di verifikasi dengan ketat

2.3.7. SK.VII.Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14/KEP/M.PAN RB/2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;



6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Besar KIPM Jakarta I dilaksanakan selama 4 periode triwulan p dengan metode perhitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}}$$

Waktu Pelaksanaan SKM Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	Januari 2025	8
2	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.63	3.60	3.63	3.63	3.67	3.52	3.52	3.59	3.57
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	89,92 (A atau Sangat Baik)								



Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025				Renstra BPPMHKP
TW I	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	0	88	89,92	102,18	88	88
TW II	2024	Target Tw II	Realisasi	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	85,61	88	92,32	104,91	88	88

1. Capaian IKU

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jakarta I secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 89.92. Kemudian nilai SKM Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jakarta I menunjukkan sedikit penurunan tetapi tetap pada kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan IIV 2024 hingga Triwulan II 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelayanan, Persyaratan dan waktu penyelesaian.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Biaya/Tarif dan Sarana dan Prasarana.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :



1. 2 (dua) unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,52. Selanjutnya Prilaku mendapatkan nilai 3,52 adalah nilai terendah Kedua.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk Layanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,67. Selanjutnya Persyaratn, Waktu dan Biaya mendapatkan 3,63..

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Secara pelayanan sudah sangat baik, agar lebih meningkatkan mungkin di sarana” penunjang serta dengan di dukung anggaran yang memadai untuk meningkatkan pelayanan
- “Regulasi yang diacu lebih diperjelas”.
- “Respon lamban sekali”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasana merupakan penunjang dalam melaksanakan layanan, kedepan dengan dengan terbatasnya anggaran akan memaksimalkan dalam perbaikan sarana dan prasarana.
- Persyaratan kelengkapan dokumen sertifikasi sudah ditampilkan di ruang pelayanan, namun pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas pelayanan.
- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik terhadap Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan Pelayanan baik kujungan kerja dan pelayanan
- Merencanakan kebutuhan pelayanan dan fasilitas yang di butuhkan



REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun Anggaran 2025 sudah tidak ada anggaran secara DIPA dan untuk operasional kegiatan perkantoran Balai Besar KIPM Jakarta I memakai anggaran Stasiun KIPM Merak maka Balai Besar KIPM Jakarta I tidak bisa melampirkan realisasi anggaran tahun 2025

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar KIPM Jakarta I Triwulan II tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Balai Besar KIPM Jakarta I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Terhadap capaian IKK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan setahun, pada Triwulan Ke I ada 2 target IKK yang menjadi target

- ❖ Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dengan target 85 dan capaian realisasi 100 %
- ❖ Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 88 dan capaian realisasi 89,92

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal

- I. Untuk kegiatan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%) di target kan pada Triwulan ke II dan semesteran
- II. Untuk Kegiatan Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%) belum di laksanakan pada triwulan ke I
- III. Untuk Kegiatan Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%) akan dilaksanakan pada triwulan ke II atau semeseter I

Guna memaksimal dan capaian target IKK maka capaian target pada Triwulan Ke II dan Semseteran sudah bisa tercapai





Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target JUNI	Capaian JUNI	%	Target s/d JUNI	Capaian s/d JUNI	%
SK.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						113,67			113,67	
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.1	Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.2	Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	95,51	120	70	95,51	120
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta										
IKSK.3	Data Dukung1	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99	99	100	101,01	99	100	101,01
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						111,23			111,23	
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.03.1		Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0	
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.03.2	Data Dukung1	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,34	111,12	75	83,34	111,12
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.03.4	Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	100	117,65	85	100	117,65
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I										
IKSK.03.5	Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	92,32	104,91	88	92,32	104,91



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130, JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.bkpp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Anggoro**
 Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Sri Angoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Sri Angoro



Jumlah Temuan	4 Temuan	TUNTAS : 5 Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi	5 Rekomendasi	PROSES : 0 Rekomendasi
Nilai Keuangan	Rp2,314,200.00	PENDING : 0 Rekomendasi
Nilai Setoran Ke Kas Negara	Rp2,314,200.00	SISA NILAI KEUANGAN : Rp0.00
Prosentase Tindak Lanjut	100.00%	

ID	Judul Temuan	Σ Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
11072	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Lembur Senital Rp2.314.200,00	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11073	Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 Belum Seluruhnya Diregister dan Dilengkapi Geotagging	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11074	Dokumen Pengadaan (Kontrak) tidak Sesuai Ketentuan	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11075	Sisa Anggaran 2024 Kurang Memadai dalam Pembayaran Operasional Satker (1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

SATUAN KERJA : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp64,043,868.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 24 Apr 2025
Rp64,043,868.00 Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 24 Apr 2025 0.00%

NOTE:
Sejena lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektoral Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP
Change Password
Logout

STATUS : **IKU Success**

CAPAIAN TLHP 100%

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 12

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 5 LHP
LHP SURAT	: 7 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 43

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 13 Temuan
Kelemahan SPI	: 27 Temuan
Temuan 3-E	: 3 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 71

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 71 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

